

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Berakhirnya Perang Dunia Ke 2 memberikan banyak fenomena baru di dunia. Salah satu yang menarik adalah munculnya Negara-negara baru yang memproklamasikan kemerdekaannya. Negara-negara tersebut sebagian besar berada pada kawasan Asia dan Afrika. Kedua kawasan terdiri dari Negara-negara yang oleh Negara-negara maju disebut sebagai Negara-negara selatan. Dapat dikatakan juga bahwa Negara-negara selatan merupakan Negara yang sedang mengalami fase pasca kolonial. Kemerdekaan dari belenggu penjajahan menimbulkan sebuah optimisme terhadap stabilitas pemerintahan Negara. Cita-cita sebuah pemerintahan yang mandiri menjadi titik awal berpijak bagi Negara-negara baru tersebut.

Namun cita-cita tidak selalu sesuai dengan realitas, memasuki era abad 21 hanya sebagian Negara-negara baru tersebut yang dapat memiliki pemerintahan yang stabil. Kondisi politik dalam negeri yang kacau menimbulkan ketidakstabilan dalam suatu pemerintahan. Kondisi tersebut pada akhirnya menimbulkan rasa tidak percaya rakyat terhadap pemerintahannya.

Timor Leste merupakan Negara termuda di dunia. Negara ini adalah yang pertama berdiri pada era tahun 2000-an. Bentuk pemerintahannya adalah Sistem Parlementer dimana kepala Negara dipimpin oleh seorang Presiden dan pemerintahannya dipimpin oleh Perdana Menteri. Pemerintahan atau Kabinet dibentuk oleh partai pemenang pemilu. Partai Politik di Timor Leste merupakan unsur terpenting dalam pemerintahan. Partai

politik di Timor Leste memiliki sejarah yang cukup panjang. Sejarah ini juga merupakan sejarah panjang Timor Leste.

Sejarah berawal pada Tahun 1974, setelah mengalami “Revolusi Bunga” yang menjatuhkan rezim Salazar, Portugal memulai proses dekolonisasi bagi seluruh koloninya berdasarkan prinsip penentuan nasib sendiri.<sup>1</sup> Pada tanggal 27 Juli 1975 Undang-Undang Portugal Nomor 7 Tahun 1975 menetapkan penyelenggaraan pemilihan umum di Timor Portugis untuk membentuk suatu majelis rakyat tahun 1976. Majelis rakyat ini kemudian akan membentuk pemerintahan baru dan Portugal sedianya akan menyerahkan kekuasaannya kepada negara Timor yang baru pada bulan Oktober 1978.<sup>2</sup>

Proses dekolonisasi ini disambut di Timor Portugis dengan pembentukan partai-partai politik, masing-masing dengan aspirasinya sendiri. Tiga partai politik terbesar adalah *União Democrática Timorese* (UDT) yang menginginkan kemerdekaan bertahap melalui “otonomi progresif” di bawah Portugal, *Frente Revolucionária do Timor Leste Independente* (Fretilin) yang menginginkan kemerdekaan segera, dan *Associação Popular Democrática de Timor* (Apodeti) yang menghendaki integrasi otonom dengan Republik Indonesia. Belakangan juga muncul partai-partai politik lebih kecil, antara lain *Klibur Oan Timor Assuain* (KOTA), dan *Partido Trabalhista* (Partai Buruh).

Bulan Januari 1975, UDT dan Fretilin membentuk koalisi berdasarkan prinsip kemerdekaan, penolakan integrasi dengan Indonesia, dan pembentukan sebuah pemerintahan transisi yang terdiri dari wakil-wakil kedua partai. Namun koalisi ini gagal mengatasi berbagai perbedaan yang muncul diantara pendukung masing-masing partai

---

<sup>1</sup> Resolusi Majelis Umum PBB 1514/1960 telah mengukuhkan hak atas penentuan nasib sendiri bagi bangsa-bangsa jajahan.

<sup>2</sup> Keputusan Pemerintah Portugal No. 203/1974 dan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1975 seperti diterbitkan Heike Krieger (editor), *East Timor and the International Community: Basic Documents* (Cambridge University Press, 1997).

dan kemudian pecah pada bulan Mei 1975. Situasi kemudian dengan cepat memburuk, hingga terjadi bentrokan terbuka antara pendukung kedua partai.<sup>3</sup>

Pada tanggal 11 Agustus 1975, UDT dengan dukungan komandan kepolisian Timor Portugis melancarkan gerakan bersenjata, menduduki sejumlah fasilitas pemerintah dan menangkap serta menahan ratusan pemimpin Fretilin. Fretilin, dengan dukungan dari putra Timor anggota tentara kolonial, melancarkan serangan balasan melawan UDT pada tanggal 20 Agustus 1975. Perhatian pemerintah pusat Portugal yang tertuju pada urusan lain, dan dengan semakin memburuknya situasi, pada tanggal 26 Agustus 1975, Gubernur Timor Portugis Mário Lemos Pires menyingkir ke pulau Ataúro bersama sekelompok pejabat pemerintah yang masih tersisa. Akibat konflik bersenjata ini, anggota UDT mengungsi ke wilayah Indonesia awal September 1975 dan Fretilin tetap menguasai wilayah. Tiga partai lainnya, Apodeti, KOTA dan Trabalhista mengikuti UDT menyeberang perbatasan. Mereka membawa ribuan orang masuk ke Atambua.

Keberadaan Fretilin sebagai satu-satunya partai yang pro-kemerdekaan merupakan sebuah harapan dan optimisme bagi rakyat Timor Leste. Fretilin memproklamasikan deklarasi kemerdekaan sepihak tanggal 28 November 1975. Deklarasi ini tidak diakui oleh pemerintah Portugal. Dua hari kemudian, empat partai politik, UDT, Apodeti, KOTA dan Trabalhista memproklamasikan keinginan mereka untuk mengintegrasikan Timor Timur ke dalam Indonesia, dikenal sebagai Deklarasi Balibo. Portugal tidak mengakui kedua deklarasi karena masih menganggap dirinya sebagai penguasa

---

<sup>3</sup> Helen Mary Hill, *Gerakan Pembebasan Nasional Timor Lorosae* (Dili: Yayasan HAK dan Sahe Institute for Liberation, 2000), 171. Catatan KKP tentang Submisi dari Leigh-Ashley Lipscomb mengenai latar belakang konteks lokal konflik di Timor Timur tahun 1999, *Spontaneous Retribution: Local Dimensions of the conflict in East Timor in 1999*, 15 November 1999, Arsip KKP.

administratif, dan tetap berpendapat bahwa persoalan Timor Portugis harus diselesaikan melalui sebuah referendum yang melibatkan semua partai politik.

Perjuangan Fretilin bersama rakyat untuk merdeka terus berlangsung sampai dibentuknya Pemerintahan Sementara Timor Timur (PSTT) pada tanggal 17 Desember 1976. Fretilin terus melakukan perlawanan terhadap PSTT yang sebagian besar tokohnya adalah anggota UDT dan Apodeti. Pada tanggal 17 Juli 1976 Timor Timur resmi menjadi provinsi ke- 27 dari Republik Indonesia dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1976 oleh Presiden Soeharto. Masuknya Timor Timur menjadi bagian dari Indonesia semakin mempersulit jalan bagi Fretilin untuk memerdekakan Timor Timur. Masuknya gerakan militer Indonesia semakin membuat Fretilin sengsara. Perjuangan Fretilin harus dibayar dengan nyawa para pejuangnya termasuk para warga pribumi yang menjadi korban kekejaman militer Indonesia.

Fretilin bersama rakyat terus melakukan perlawanan atas pemerintah Indonesia hingga diadakannya jajak pendapat tahun 1999. Jajak pendapat merupakan hasil perjuangan seluruh rakyat terutama Fretilin untuk menunjukkan kepada dunia Internasional bahwa terjadi berbagai pelanggaran Hak Asasi Manusia selama kependudukan Indonesia. Berdasarkan hasil jajak pendapat, Timor Timur resmi lepas dari Indonesia dan menjadi Negara yang merdeka dan diakui secara Internasional pada tanggal 20 Mei 2002.

Perjalanan sejarah Timor Leste yang cukup panjang menorehkan catatan sejarah perjuangan Fretilin sebagai partai politik pelopor kemerdekaan yang sangat dekat dihati rakyat. Dalam Undang-Undang Dasar Timor Leste terjemahan tidak resmi pada bagian mukadimah disebutkan bahwa:

“Setelah pembebasan Rakyat Timor Leste dari penjajahan dan pendudukan yang tidak sah atas Tanah Air Maubere oleh kekuatan asing, kemerdekaan Timor Leste, yang diproklamirkan oleh Front Revolusioner Timor Leste Merdeka (FRETILIN) pada tanggal 28 November 1975, diakui secara internasional pada tanggal 20 Mei 2002.

Perancangan dan pengesahan Undang-undang Dasar Republik Demokratis Timor Leste merupakan puncak dari perlawanan rakyat Timor Leste yang berlangsung berabad-abad, yang ditingkatkan setelah penyerbuan pada tanggal 7 Desember 1975.

Perjuangan melawan musuh, yang pada awalnya di bawah kepemimpinan FRETILIN, diperluas menjadi bentuk-bentuk keikutsertaan politik yang menyeluruh, khususnya setelah pembentukan Dewan Nasional Perlawanan Maubere (CNRM) pada tahun 1987 dan Dewan Nasional Perlawanan Rakyat Timor (CNRT) pada tahun 1998.”

Rakyat Timor Leste melalui Undang-Undang Dasarnya sangat jelas memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Fretilin yang menjadi akar perjuangan kemerdekaan Timor Leste.

Namun kepercayaan rakyat kepada pemerintah, khususnya Fretilin mengalami penurunan pada saat diadakannya pemilu pertama yang dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2001. Berdasar hasil pemilu kemenangan Fretilin meskipun mayoritas namun tidak bisa dikatakan mutlak. Perolehan 57,37 % suara masih jauh dari target yaitu 88% suara. Xanana Gusmao yang memenangkan Pemilu Presiden dengan perolehan suara 82,66% suara juga bukan merupakan calon dari Fretilin. Selain Fretilin, setidaknya ada 4 partai besar yang menjadi penghambat bagi Fretilin untuk mempertahankan kekuasaannya. Dua partai merupakan partai yang dibesarkan oleh orang-orang yang

berasal dari pendidikan Indonesia. Yang pertama adalah PD (*Partai Demokratik*) yang merupakan kelanjutan dari perkumpulan mahasiswa Timor di Indonesia atau dikenal dengan Impettu (Ikatan Mahasiswa dan Pelajar Timor Timur). Partai yang kedua adalah PSD (*Partai Social Democrata*), pimpinan Ir. Mario Vegas Carascalao yang merupakan mantan Gubernur Timor Timur pada saat masih bergabung dengan Indonesia.

Masuknya PD dan PSD dalam lima besar partai yang berkuasa di Timor Leste merupakan bukti masih adanya kenangan baik dari Indonesia. Hal ini sangat melemahkan posisi Fretilin di mata rakyat. Sebagai partai yang berjuang selama puluhan tahun untuk mendapat kemerdekaan, Fretilin memiliki beban moral kepada rakyat Timor Leste untuk membuktikan bahwa pilihan kemerdekaan adalah tepat untuk masa depan Negara.

Puncak dari menurunnya popularitas dan hegemoni Fretilin adalah terpilihnya Xanana Gusmao sebagai Perdana Menteri hasil dari pemilu 2007. Konstitusi di Timor Leste mengisyaratkan bahwa pemerintah dibentuk oleh partai pemenang atau koalisi dari partai-partai yang memiliki mayoritas di parlemen. Meskipun Fretilin adalah partai pemenang pemilu, tetapi kemenangannya tidak mencapai 30% suara. Artinya untuk dapat memenuhinya, Fretilin harus berkoalisi dengan partai lain. Upaya yang dilakukan Fretilin tidak berjalan mulus, Fretilin hanya mampu menambah 2 kursi di parlemen hasil dari koalisi dengan Aliansi Demokratik sehingga total kursi fretiln hanya 23 kursi sedangkan mayoritas mutlak kursi di parlemen adalah 33 kursi. Atas dasar itulah Presiden Jose Ramos-Horta menunjuk Xanana Gusmao sebagai Perdana Menteri. Xanana merupakan calon dari CNRT (Dewan Nasional Perlawanan Rakyat Timor) yang berkoalisi dengan mayoritas partai di parlemen sehingga berhak membentuk pemerintahan.

Terbentuknya pemerintahan Timor Leste dibawah PM Xanana Gusmao merupakan sebuah tantangan bagi pemerintah Timor Leste. Meskipun PM Xanana Gusmao adalah kepala pemerintahan yang sah, tetapi tidak murni hasil dari perjuangan partai CNRT. Kemenangan PM Xanana Gusmao di parlemen merupakan hasil koalisi artinya posisi dari partai Fretilin yang notabene adalah pemenang pemilu masih cukup kuat di parlemen dan di mata rakyat. Perolehan suara Fretilin merupakan cerminan bahwa Fretilin masih berada di hati rakyat Timor Leste walaupun popularitasnya menurun. Atas dasar tersebut, Fretilin masih menjadi kekuatan yang cukup besar untuk dapat memberikan hegemoni kepada rakyat agar menentang pemerintah. Hal inilah yang menjadi tantangan terbesar bagi pemerintah Timor Leste.

## **B. Pokok Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis menetapkan pokok permasalahan yang bisa dijadikan sumber penelitian yakni, “Bagaimana pengaruh Fretilin sebagai partai oposisi terhadap legitimasi pemerintahan PM Xanana Gusmao?”

## **C. Kerangka Dasar Teori**

Penulis menggunakan konsep keabsahan yang disampaikan oleh Prof. Miriam Budiardjo dalam buku Dasar-Dasar Ilmu Politik, beliau menuliskan:

“pada kebanyakan Negara-negara baru dimana kesetiaan lokal (*Primordial attachment*) tampak masih lebih kuat dibandingkan dengan kesetiaan nasional, serta banyak suku, golongan, dan aliran, maka soal keabsahan

(*legitimacy*) perlu digalang. Keabsahan adalah konsep bahwa kedudukan seseorang atau sekelompok penguasa diterima baik oleh masyarakat oleh karena sesuai dengan azas-azas dan prosedur yang berlaku dan yang dianggap wajar”.<sup>4</sup>

Legitimasi dalam Wikipedia Indonesia diartikan seberapa jauh masyarakat mau menerima dan mengakui kewenangan, keputusan dan kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin. Dalam konteks legitimasi, maka hubungan antara pemimpin dan masyarakat yang dipimpin lebih ditentukan oleh keputusan masyarakat untuk menerima atau menolak kebijakan yang diambil oleh sang pemimpin.<sup>5</sup>

Sebagai indikator dari legitimasi penulis akan menggunakan tulisan Marie A. Dugan dan Gellner dalam artikelnya yang berjudul *Legitimacy*.<sup>6</sup> Ada tiga indikator yaitu segi kepatuhan terhadap kebijakan hukum yang dibuat pemerintah, segi ekonomi, dan segi sosial budaya. Kepatuhan terhadap hukum menjadi sebuah indikator legitimasi karena pada dasarnya negara adalah sebuah institusi yang diatur oleh hukum. Hanya ada dua pilihan dalam hukum yaitu ketaatan dan ketidaktaan terhadap hukum yang dibuat oleh pemerintah. Dari segi ekonomi, masyarakat akan memberikan dukungan terhadap pemerintah jika mereka mendapatkan sesuatu dari negara yaitu kemakmuran ekonomi. Mempertahankan budaya bangsa merupakan indikator legitimasi dari segi sosial budaya. Apabila ada sebagian masyarakat yang tidak menghargai budaya kesatuan maka akan mempengaruhi legitimasi.

Ketiga indikator diatas dapat digunakan untuk mendefinisikan legitimasi kuat dan legitimasi lemah. Legitimasi dikatakan kuat indikator pertamanya apabila masyarakat

---

<sup>4</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Pt Gramedia Pustaka Utama, Jakarta:2006, hal. 37-38

<sup>5</sup> “Legitimasi”, <http://id.wikipedia.org/wiki/Legitimasi>, 2 Januari 2008

<sup>6</sup> Marie A. Dugan, “Legitimacy”, <http://www.beyondintractability.org/essay/legitimacy/>, 8 Mei 2008

mematuhi aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah. Kepatuhan hukum ini tercipta ketika ada kepercayaan dari rakyat bahwa segala aturan yang dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk menjaga stabilitas bagi terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Indikator kedua legitimasi dikatakan kuat apabila pemerintah dapat memberikan kemakmuran ekonomi dan keamanan kepada masyarakat. Legitimasi akan kuat apabila masyarakat mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan dari pemerintah. Indikator ketiga kuatnya legitimasi apabila seluruh masyarakat percaya dan memegang teguh norma persatuan. Kepercayaan itu akan memberikan keuntungan yang berkelanjutan di masa yang akan datang.

Legitimasi tidak selamanya kuat. Pengalaman dari negara-negara berkembang dan negara-negara yang baru merdeka memberikan gambaran tentang lemahnya legitimasi pemerintah terhadap masyarakat. Indikator pertama lemahnya legitimasi adalah ketidakpatuhan masyarakat terhadap aturan hukum yang dibuat oleh pemerintahan. Ketidakpatuhan berawal dari ketidakpercayaan yang akhirnya berakibat pada ketidakteraturan dan menunjukkan institusi negara yang lemah. Legitimasi juga dapat dikatakan lemah apabila masyarakat tidak mendapatkan kemakmuran ekonomi dan keamanan. Krisis ekonomi, banyaknya pengangguran, pembangunan yang gagal dan tingkat kejahatan yang tinggi dapat melemahkan legitimasi.

Cita-cita pemerintahan yang stabil hanya dapat tercapai ketika legitimasi rakyat kuat. Unsur terpenting bagi legitimasi adalah kepercayaan. Pemerintahan yang tidak stabil adalah pemerintahan yang pemimpinnya tidak dipercaya oleh rakyatnya. Legitimasi berkaitan dengan apakah rakyat menerima atau tidak hak moral dari pemimpin-pemimpin

politik untuk membuat keputusan-keputusan yang mengikat atas mereka; hanya rakyat yang dapat memberikan legitimasi.<sup>7</sup>

Dari penjelasan diatas menunjukkan bahwa rakyat yang memberikan legitimasi. Dalam suatu pemerintahan, rakyat juga merupakan unsur terpenting. Keterwakilan rakyat di dalam suatu pemerintahan dapat diwujudkan salah satu caranya adalah dengan partai politik. Menurut Sigmund Neumann dalam karangannya *Modern Political Parties* sebagai berikut:

“Partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda” (A Political party is the articulate organization of society’s active political agents, those who are concerned with the control of government power and who compete for popular support with another group or groups holding divergent views).<sup>8</sup>

Definisi diatas menjelaskan bahwa tujuan partai politik adalah menguasai pemerintahan. Tujuan tidak selamanya tercapai, apabila partai politik gagal menguasai pemerintahan maka langkah yang ditempuh adalah menjadi partai oposisi. Menurut Prof. Miriam Budiardjo dalam buku *Dasar-Dasar Ilmu Politik* terdapat sistem dwi partai. Beliau menuliskan bahwa dalam sistem ini sebenarnya terdiri dari 2 atau lebih partai politik, tetapi hanya 2 partai yang dominan. Partai yang kalah berperan sebagai pengecam utama tapi yang setia (loyal opposition) terhadap kebijaksanaan partai yang duduk dalam

---

<sup>7</sup> Charles f. Andrain, *Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial*, hal 203

<sup>8</sup> Sigmund Neumann, *Modern Political Parties* dalam *Comparative Politics: A Reader*, edited by Harry Eckstein and David E. Apter (London: The Free Press of Glencoe, 1963), hal 352

pemerintahan, dengan pengertian bahwa peranan ini sewaktu-waktu dapat bertukar tangan. Dalam persaingan memenangkan pemilihan umum kedua partai berusaha merebut dukungan orang-orang yang ada di tengah dua partai dan yang sering dinamakan pemilih terapung(*floating vote*).<sup>9</sup>

Timor Leste sebagai negara termuda di dunia sedang mengawali proses menuju pemerintahan yang stabil. Pemerintahan yang stabil hanya akan terwujud apabila ada kepercayaan dari rakyat kepada pemerintah. Kepercayaan rakyat menjadi sangat penting karena merupakan unsur terpenting dari legitimasi. Legitimasi hanya bisa diberikan oleh rakyat kepada pemerintahan.

Fretilin merupakan partai yang sudah sejak awal bersama-sama dengan rakyat memperjuangkan kemerdekaan Timor Leste. Perjuangan Fretilin sangat membekas di hati rakyat Timor Leste. Hegemoni Fretilin terhadap rakyat masih sangat kuat sampai sekarang. Terpilihnya Xanana sebagai Perdana Menteri yang baru merupakan masalah bagi pemerintah Timor Leste. Xanana merupakan Perdana Menteri yang terpilih bukan dari partai Fretilin artinya pemerintahan Timor Leste tidak berada ditangan Fretilin.

Posisi Fretilin sebagai partai oposisi merupakan peran yang dimainkan setelah kegagalan Fretilin menguasai pemerintahan. Peran ini sangat frontal dimainkan Fretilin dengan berbagai upaya mempengaruhi rakyat dan partai lain untuk menentang pemerintahan PM Xanana Gusmao. Hal ini pada akhirnya melemahkan legitimasi pemerintahan PM Xanana Gusmao dimata rakyat Timor Leste. Lemahnya legitimasi PM Xanana Gusmao terlihat ketika situasi di Timor Leste menjadi tidak aman, artinya ada ketidakpatuhan terhadap aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah. Indikator yang kedua adalah lemahnya perekonomian. Sejak Timor Leste merdeka belum ada kemajuan

---

<sup>9</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta:2006, hal 168

ekonomi yang terlihat. Kebijakan Xanana justru berorientasi pada kepentingan asing dengan menjual berbagai kekayaan alam seperti minyak ke Australia.

Lemahnya legitimasi PM Xanana Gusmao tentunya berawal dari ketidakpercayaan rakyat. Rakyat masih lebih percaya kepada Fretilin yang merupakan partai oposisi dibandingkan dengan Xanana yang merupakan Perdana Menteri yang menang karena koalisi. Upaya-upaya yang dilakukan Fretilin untuk menggulingkan pemerintahan Xanana mencerminkan lemahnya legitimasi pemerintahan PM Xanana di mata rakyat Timor Leste. Pemerintahan masih sangat lemah bahkan Fretilin melalui Mari Al Katiri selaku Sekertaris Jenderal menyatakan bahwa kekuasaan yang diberikan presiden kepada Xanana Gusmao atas dukungan partai koalisi, melawan konstitusi dan menyalahi undang-undang Pemilu. Salah satu wujud lemahnya legitimasi pemerintah PM Xanana Gusmao adalah dengan adanya berbagai demonstrasi terhadap pemerintah.

Fretilin tidak mengakui legitimasi pemerintahan. Maka konsekuensinya, semua perjanjian yang dibuat oleh PM Xanana dengan negara lainnya yang bisa menyebabkan berkurangnya kedaulatan negara Timor Leste atau perjanjian eksplorasi hak sumber daya alam Timor Leste, atau kebijakan yang membuat perubahan struktur pemerintahan Timor Leste tidak akan berlaku. Suara Fretilin di parlemen yang masih cukup besar bisa menggagalkan berbagai kebijakan yang akan dibuat pemerintah. Hal ini sangat jelas membuktikan bahwa posisi partai Fretilin sebagai oposisi melemahkan legitimasi pemerintahan PM Xanana Gusmao di mata rakyat Timor Leste.

#### **D. Hipotesa**

Berdasarkan latar belakang dan melihat rumusan masalah diatas dengan menggunakan pendekatan teoritik serta kerangka konseptual maka dikemukakan bahwa posisi Fretilin sebagai partai oposisi melemahkan legitimasi pemerintahan PM Xanana Gusmao.

#### **E. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif. Data bersumber dari buku-buku, jurnal-jurnal yang bersumber dari koran, internet, dan majalah. Selain itu, sebagai sumber data yang lain, penulis melakukan wawancara dengan narasumber. Narasumber yang pertama adalah Natalino de J.G. Soares. Dia adalah mantan asisten pribadi Mari Alkatiri dan juga salah satu tokoh Fretilin. Saat ini, Natalino sedang melanjutkan pendidikan di Australia. Narasumber yang kedua adalah Manuel da Costa e Silva. Dia adalah salah satu pemerhati politik pemerintahan Timor Leste. Data yang diperoleh kemudian diolah dengan teknik analitis deskripsi.